

**ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MELALUI PROGRAM
TRANSMIGRASI UMUM
(Studi Kasus di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep)**

DEDY ARFIYANTO

(mrdego.ar@gmail.com)

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Wiraraja Sumenep

ABSTRAK

Pembangunan masyarakat dan pemberdayaan rakyat tidak mungkin dapat dipisahkan dari arena dan konteks dimana ia beroperasi. Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari strategi dan program pembangunan kesejahteraan sosial. Salah satu solusi untuk yang ditawarkan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dengan programnya yaitu melalui program transmigrasi, dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat membuka lahan baru untuk meningkatkan taraf hidupnya dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi, dengan mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Dalam penelitian menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif. Dalam hal ini, yang menjadi fokus penelitian a. Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, b. Pemberdayaan masyarakat miskin di daerah transmigran. dengan populasi 46 informan dan sampel 46 informn. Sesuai dengan masalah tersebut, data yang digunakan berupa indept interview, observasi, dokumen selanjutnya dianalisa dengan menggunakan diskriptif kualitatif.

Hasil analisa menunjukkan peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sangat berperan aktif dan dapat memberdayakan masyarakat miskin di daerah transmigran.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan, Transmigrasi.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah yang bersifat umum bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun fenomena penduduk miskin masih terdapat di pedesaan dan perkotaan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah tengah masyarakat yang senantiasa relevan dengan pembangunan kesejahteraan sosial, karena kemiskinan bersifat multidimensional yang secara

ekonomi sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dengan programnya yaitu melalui program transmigrasi, dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat membuka lahan baru untuk meningkatkan taraf hidupnya dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi, dengan mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigrasi dan masyarakat sekitarnya, peningkatan pemerataan pembangunan daerah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembangunan transmigrasi ke depan masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pada tataran implementasi, transmigrasi selama ini mengalami berbagai kendala besar, yang kemudian berdampak pada kesenjangan antara konsep (kebijakan) dan realitas pencapaian sasaran dan tujuan. Koreksi pada aspek pelaksanaan, mencakup berbagai hal, antara lain: fasilitas pemukiman, fasilitas perpindahan, penyelesaian masalah lahan, serta penatalaksanaan manajemen transmigrasi.

Implikasi kebijakan lainnya adalah bahwa transmigrasi diselenggarakan dengan mengejar target sasaran pemindahan secara kuantitatif. Penyelenggaraan transmigrasi mulai diarahkan pada upaya pembangunan daerah, namun paradigma yang mendasarinya masih berciri demografis sentrik, dengan tetap berorientasi pada pemindahan dan penyebaran penduduk secara besar-besaran ke luar Jawa.

Permasalahan yang dialami transmigran bermuara pada dua permasalahan utama, yaitu permasalahan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pada kawasan transmigrasi dan kualitas sumber daya manusia, untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada kawasan transmigrasi dan peningkatan kemampuan masyarakat transmigrasi.

Menyadari permasalahan yang berkaitan dengan lokasi transmigrasi maka pada saat ini dikembangkan penyelenggaraan transmigrasi yang diarahkan pada pendekatan untuk mendukung pembangunan daerah melalui pembangunan pusat-pusat produksi, perluasan kesempatan kerja serta pengadaan tenaga kerja terampil dan pembangunan dinyatakan secara eksplisit dalam program Kota Kerja Terpadu.

Pembangunan Transmigrasi ke depan masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun demikian, kebijakan penyelenggaraan transmigrasi perlu diperbaharui, dan disesuaikan dengan kecenderungan (trend) perubahan yang terjadi akhir-akhir ini, terutama perubahan pada tata pemerintahan.

Di Kabupaten Sumenep pelaksanaan program transmigrasi masih terlalu sulit, karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor pendidikan yang masih rendah, pengetahuan tentang transmigrasi yang masih belum tahun, dan adanya budaya dimana budaya dan adat istiadat yang masih melekat di masyarakat, yaitu makan tidak makan asal kumpul walaupun kehidupannya miskin karena masih dibantu oleh sanak famili.

Berdasarkan ulasan di atas peneliti ini mengetahui bagaimanakah peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui program transmigrasi umum dan bagaimanakah pemberdayaan masyarakat miskin melalui program transmigrasi di daerah transmigran?

B. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan interview, maka dari masing-masing fokus yang teliti menunjukkan bahwa:

Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui transmigrasi umum, telah

sangat membantu para transmigran, sehingga para transmigran mampu dalam mengembangkan diri dalam mengolah pembukaan lahan baru yang diberikan oleh dinas.

Dengan demikian peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep, sangat berperan langsung dan peran disini telah sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga keberadaan dinas ini sangat mutlak diperlukan oleh masyarakat miskin dalam memberdayakan dirinya melalui program transmigrasi umum.

Dalam pemberdayaan masyarakat merupakan tingkat kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Oleh karena itu pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan keadaan lingkungan yang baru, sehingga adanya pemberdayaan ini para transmigran dapat mampu menumbuhkembangkan kreativitas dirinya dengan bekal yang sudah ada, yang selanjutnya diberdayakan untuk memperoleh hasil yang dapat mengubah pola kehidupan yang baru.

Ini membuktikan bahwa transmigrasi yang merupakan perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi dengan kegiatan penataan dan persebaran penduduk melalui perpindahan ke dan di wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan dengan kegiatan penyiapan permukiman, pengarahan dan penempatan serta pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi (Bab Ketentuan Umum, PP No. 2 Th 1999).

Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Daerah Transmigran

Pemberdayaan masyarakat di daerah transmigran setelah diadakan interview dengan pemilik program transmigrasi menunjukkan para transmigran di daerah transmigrasi telah dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, dengan mampu dapat mengolah lahan dan mampu beridikari dan mampu melakukan

wirausaha dari dana bantuan yang ada, sehingga keberadaan di daerah transmigrasi benar-benar dikelola dan dimanfaatkan secara benar dan baik, yang kesemuanya ini untuk meningkatkan kesejahteraan.

Keadaan yang demikian memberikan arti bahwa peningkatan pola hidup para transmigran di daerah transmigrasi telah lebih baik dari pada di daerah asalnya, pemberdayaan disini telah sangat nampak jelas dengan pola transmigrasi umum telah membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya beserta keluarga yang dibawa ke daerah transmigrasi.

Dengan demikian kebijakan transmigrasi diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin menekankan pada tiga hal pokok (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi), yaitu : (a) Ikut serta dalam penanggulangan kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak. (b) Memberi peluang berusaha dan kesempatan kerja kepada masyarakat. (c) Memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakan perpindahan penduduk dan mendukung pemberdayaan potensi sumberdaya wilayah, kawasan dan lokasi yang pemanfaatannya kurang optimal agar berkembang lebih produktif. Adanya hal tersebut memberikan arti pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro.

Dalam kerangka pemikiran itu berbagai input seperti dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat terutama pada masyarakat miskin. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) dalam meningkatkan kesejahteraannya. Adanya ini sangat membantu dalam menerapkan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program transmigrasi umum, sehingga penerapan ini dapat membantu pihak dinas dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui program transmigrasi.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui intreview kepada informan, maka didapat sebagai berikut : (a) Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui transmigrasi umum, telah sangat membantu para transmigran, sangat berperan langsung dan peran disini telah sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga keberadaannya sangat mutlak diperlukan oleh masyarakat miskin dalam memberdayakan dirinya melalui program transmigrasi umum. (b) Pemberdayaan masyarakat di daerah transmigran menunjukkan para transmigran di daerah transmigrasi telah dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, dengan mampu dapat mengolah lahan dan mampu beridikari dan mampu melakukan wirausaha dari dana bantuan yang ada, sehingga keberadaan di daerah tranmigrasi benar-benar dikelola dan dimanfaatkan secara benar dan baik, yang kesemuanya ini untuk meningkatkan kesejahteraan.

2. Saran

Bentuk saran alternatif yang dapat diberikan peneliti dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui program transmigrasi umum, adalah: (a) Untuk menerapkan fungsinya dalam memberikan motivasi kepada masyarakat miskin untuk dapat bertransmigrasi dengan pola transmigrasi umum agar tingkat kesejahteraannya lebih terjamin dan meningkat; (b) Lebih ditingkatkan bantuan sarana dan prasana agar para tranmigran lebih nyaman dan tinggal mengelola secara konsiten dalam meningkatkan hasil usahanya; (c) Untuk diberikan modal usaha kerja tidak hanya pada pembukaan lahan baru dan alatnya, sehingga lebih berdaya masyarakat miskin yang ikut transmigrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, 2001, *Agar Kekayaan Dilimpahkan dan Kemiskinan Dijauhkan*, Republika, Jakarta.
- Aliyah, 2001, *“Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat”*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Chambers, Robert, 2000, *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? Uner Kirdar dan Leonard Silk People: From Impoverishment to Empowerment*, New York University Press, New York.
- Friedman, John, 2000, *Empowerment: The Politics of Alternative Development*, Blackwell, Cambridge.
- Ife, 1996, *“Community Development Creating Community, Alternative, Vision, Analys and Practise”*, Longman.
- Kartasasmita, Ginandjar, 2000, *Ekonomi Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta.
- Moenandar, Soelaiman, 2005, *Kemiskinan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Parsudi Suparlan, 2006, *Pemberdayaan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Remi, Sutyasite, Soemitro, 2002, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Selo, Sumarjan, 2006, *Kemiskinan Struktural*, Yayasan Ilmu Sosial, Putsar, Yogyakarta.
- Soerjono, Soekanto, 2005, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi, Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharto, Edi (2005b), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Sumanto, 2003, *Pembahasan Terpadu dan Metodologi Riset Buku I*, Andy, Yogyakarta.
- Sumardi, Mulyanto dan Hans Decker Ever, 2002, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Rajawali, Jakarta.